



DAFTAR ISI



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Barantan dengan POLRI 1

Kunjungan Delegasi China
ke Badan Karantina Pertanian 2

BARANTAN BAHAS PERJANJIAN KERJA SAMA
DENGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT 3

Produk Segar Hasil Rekayasa Genetik,
Perluah Diawasi ? 4
5

WABAH AFRICAN SWINE FEVER DI CHINA,
APA PENGARUHNYA TERHADAP MARKET DAGING BABI ? 6
7

Pemerintah Selandia Baru Bermaksud
Melakukan Eradikasi Terhadap Mycoplasma Bovis 8
9

Colletotrichum kahawae, masih A1 di Indonesia 10

Follow up, Isu Perlindungan Tanaman Dalam Rakor NPPO 11

Program Survailen Terhadap John Disease
Di Wilyah Saskathewan, Kanada 12

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA BADAN KARANTINA PERTANIAN DENGAN POLRI



Bertempat di Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian, Bekasi (9 Juli 2018) telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian (Barantan) dengan POLRI bersamaan dengan penutupan Bulan Bakti Karantina Pertanian Tahun 2018. Perjanjian kerjasama ini sebagai upaya meningkatkan sinergitas antara Badan Karantina Pertanian dan POLRI dalam melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum untuk lebih meningkatkan dan mempererat hubungan kerja sama, koordinasi dan komunikasi yang selama ini telah berjalan dengan sangat baik antara Badan Karantina Pertanian dengan POLRI.

Dalam kesempatan ini, Barantan juga memberikan apresiasi atas dukungan dan sinergitas penegakan hukum kepada beberapa Anggota Polri di daerah, yaitu Polda Metro Jaya, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, Papua, DI Yogyakarta.

Barantan terus melakukan terobosan inovasi dan kerjasama dengan Kementerian / Lembaga terkait untuk mendukung Program Kementerian Pertanian yang tengah berupaya mencapai Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Pangan beberapa komoditas pangan strategis tahun 2015-2019 dan bertekad untuk terus melakukan pengawalan terhadap program tersebut berjalan dengan baik. (Helmi/Kerjasama)

BAHAS AKSES PASAR, DELEGASI CHINA KUNJUNGI BADAN KARANTINA PERTANIAN

Pada tanggal 26 Juli 2018 Delegasi China melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Delegasi China terdiri atas perwakilan dari *Ministry of Commerce* (MOFCOM), *General Administration of Costum of the People's Republic of China* (GACC) dan dipimpin oleh Mr. Lin Dan Yang (MOFCOM). Kunjungan diterima oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (KTKHN), Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc. didampingi oleh perwakilan dari lingkup Badan Karantina Pertanian dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura. Kunjungan dilakukan dalam rangka membahas isu *market access* produk pertanian kedua negara.

menindaklanjuti *import protocol* SBW dan salak. Dalam rangka mewujudkan ekspor buah naga Indonesia ke China, kedua belah pihak membahas jadwal kunjungan (*on site visit*) pihak China ke lokasi pertanaman buah naga di Jawa Timur (Banyuwangi) dan Bali (Buleleng) pada bulan Oktober 2018. Selain itu, Pimpinan Delegasi Indonesia menyatakan keinginan ekspor buah durian ke China yang akan diinisiasi melalui pengiriman informasi teknis budidaya durian di Indonesia.

Kedua belah pihak menanggapi dengan baik *concern* kedua negara. Untuk menghindari agar tidak terjadi hambatan, maka kedua belah pihak perlu meningkatkan transparansi kebijakan di masing-masing negara yang menyangkut aspek *Sanitary* dan *Phytosanitary* (SPS) atau aturan teknis lainnya. (UK)



Dalam kunjungannya, kedua delegasi membahas isu utama yang menjadi *concern* China, yakni keinginan China mengekspor buah jeruk ke Indonesia, sedangkan Indonesia mengangkat isu implementasi *market access* sarang burung walet (SBW), salak, buah naga, dan durian. Pihak China menyampaikan keinginan ekspor buah jeruk ke Indonesia disertai pembahasan mekanisme dan prosedur pemasukan buah segar ke Indonesia berdasarkan aturan *Pest Free Area* (PFA) dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Pihak Indonesia meminta China untuk

Oleh:
Kemas Usman, SP, M.Si.
POPT Muda Badan Karantina Pertanian



BARANTAN BAHAS PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT

Badan Karantina Pertanian (Barantan) menyelenggarakan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, tanggal 8-9 Agustus 2018 di Hotel Sahira, Bogor untuk membahas Draf PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Barantan dengan Faperta (Fakultas Pertanian) dan FKH (Fakultas Kedokteran Hewan) UNPAD dan Draf Nota Kesepahaman antara Barantan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Draf Nota Kesepahaman antara Barantan dengan Rektorat Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung memuat Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Bidang Lainnya. Draf PKS antara Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dengan Faperta UNPAD, Bandung berisi Kerja Sama Pendidikan dan Penelitian Bidang Karantina Tumbuhan sementara draf PKS antara Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dengan Fakultas Kedokteran (FKH) UNPAD tentang Kerja Sama Pendidikan dan Penelitian Bidang Karantina Hewan.

Ruang lingkup kerja sama selaras dengan peran universitas sebagai Tridharma, diantaranya kerja sama di bidang: pendidikan (S1, S2 dan S3) spesifik bagi petugas karantina, Praktik Kerja Lapangan (PKL)/magang bagi mahasiswa UNPAD, pengabdian bersama, pelatihan, metode-metode pengujian laboratorium, pengkajian ilmiah terkait dengan penyakit hewan dan tumbuhan.

Melalui PKS ini, kedua belah pihak sepekat untuk memasukkan mata kuliah mengenai karantina, agronomi, perdagangan & perlindungan (SPS) ke dalam kurikulum program studi di Faperta & FKH UNPAD.

Sementara itu terkait penyusunan Nota Kesepahaman antara Barantan dengan KSDAE tentang Pengawasan Lalu lintas Tumbuhan & Satwa Liar (TSL) kedua belah perlu meninjau kembali jenis tumbuhan & satwa liar yang akan diatur dalam ruang lingkup kerja sama.

Melalui Kerja sama ini diharapkan dapat lebih meperkuat hubungan & kerjasama antara Barantan dengan UNPAD & Ditjen KSDAE.

(Yayoek/Kerjasama)



Produk Segar Hasil Rekayasa Genetik, Perlukah Diawasi ?

Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah menikmati produk rekayasa genetika seperti kedelai untuk tempe, tahu dan lain-lain. Saat ini populasi manusia semakin meningkat sementara lahan pertanian sebagai sumber pangan semakin sempit akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, industri dan sebagainya. Selain itu perubahan ekonomi masyarakat dan pola makan terutama golongan menengah ke atas turut menyumbang perubahan pola hidup masyarakat dunia. Kondisi ini tentunya merupakan tantangan bagi para ilmuwan dunia untuk mendapatkan teknologi modern yang mampu membantu mengatasi masalah ini. Penerapan bioteknologi modern memiliki potensi untuk dikembangkan. Penerapan teknologi ini diharapkan mampu membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, khususnya di sektor pertanian, pangan, industri, kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Pangan PRG merupakan salah satu hasil penerapan teknologi modern. Pangan ini dihasilkan dengan memanfaatkan organisme yang dimodifikasi atau sering disebut proses rekayasa genetik, baik itu dalam proses produksi atau sebagai bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Teknologi rekayasa genetika ini dilakukan dengan cara menyisipkan gen (DNA) suatu organisme tanpa melalui proses reproduksi secara seksual untuk menghasilkan produk baru dengan sifat-sifat sesuai dengan yang diinginkan. Organisme yang dimodifikasi ini dapat berupa organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru. Salah satu tujuan pengembangan metode ini adalah untuk menghasilkan produk pertanian yang bersifat unggul dalam produksi dan mutu dalam waktu yang relatif singkat. Produk pertanian yang menggunakan teknik rekayasa genetika diharapkan dapat menghasilkan produk yang ramah lingkungan, aman dikonsumsi, produksi lebih tinggi, tahan lama, dan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk pertanian konvensional.

Produk rekayasa genetik (PRG) selain memiliki keunggulan juga dimungkinkan mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Pemanfaatan produk rekayasa genetik harus memperhatikan aspek keamanan hayati yang meliputi keamanan pangan dan/atau keamanan pakan dan keamanan lingkungan. Untuk meminimalisir risiko terhadap kesehatan manusia, hewan, dan



maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian PRG yang beredar dan dimanfaatkan di wilayah Republik Indonesia. Pengawasan terhadap pemasukan PRG ke dalam wilayah Indonesia telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap PRG sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2005 Pasal 13-23 yaitu bahwa PRG yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri harus diuji atau dikaji terlebih dahulu oleh Komisi Keamanan Hayati (KKH) sebelum dilepas dan/atau diedarkan. Jika berdasarkan hasil pengujian atau pengkajian tersebut dan dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan keamanan pakan maka PRG tersebut dapat dilepaskan dan/atau diedarkan di Indonesia dengan memberikan label pada kemasannya. Pangan PRG dapat berupa pangan segar yang dapat dikonsumsi langsung maupun sebagai bahan baku dalam pengolahan pangan. Pangan PRG sebagai 'novel foods' berbeda dengan pangan konvensional (counterparts) karena adanya gen baru yang disisipkan. Adanya gen baru tersebut, berpotensi dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia, seperti dapat menyebabkan alergi ataupun bersifat toksik. Oleh karenanya, peredaran dan penggunaan pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik ini masih menuai pro kontra di masyarakat, termasuk pangan segar. Beberapa pangan segar hasil rekayasa genetik memiliki keunggulan baru, diantaranya kedelai dengan produktifitas tinggi, jagung yang toleran terhadap

Pemasukan pangan segar dari luar negeri selama ini cukup tinggi, diantaranya kedelai dan jagung. Kita tidak pernah tahu apakah kedelai, jagung atau komoditas lainnya yang kita konsumsi merupakan PRG atau non PRG. Oleh karena itu untuk memberikan jaminan keamanan pangan PRG yang akan diedarkan, penting kiranya dilakukan pengawasan termasuk PRG yang berasal dari luar negeri. Saat ini telah terdapat 23 pangan PRG yang telah mendapatkan persetujuan keamanan hayati dari KKH, yaitu jagung PRG (10 komoditas), kedelai PRG (8 komoditas), tebu PRG (3 komoditas), kentang PRG (1 komoditas) dan bahan baku PRG (1 komoditas).



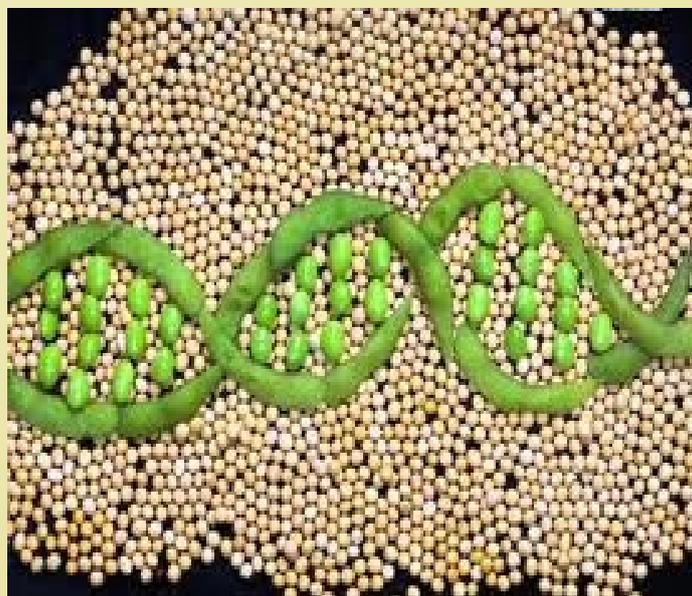
Terkait dengan pengawasan terhadap pemasukan PRG ke dalam wilayah Indonesia tersebut telah lama diwacanakan. Badan Karantina Pertanian sebagai institusi yang memiliki tugas fungsi pengawasan di pintu pemasukan/pengeluaran telah menginisiasi diselenggarakannya Focus Group Discussion (FGD) “Pengawasan Pemasukan PRG ke Dalam Wilayah Indonesia” pada 25-27 April 2018 lalu yang dihadiri oleh Ketua Komisi Keamanan Hayati, Tim Teknis Keamanan Hayati, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan BPOM serta beberapa UPT Karantina Pertanian. Beberapa rumusan yang dihasilkan dari FGD tersebut, yaitu :1. Pengawasan keamanan hayati PRG terhadap pemasukan PRG ke dalam wilayah Indonesia diperlukan untuk memastikan PRG yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia telah memenuhi aspek keamanan hayati sesuai peraturan perundang-undangan.2. Produk Rekayasa Genetik (PRG) yang diawasi adalah benih, pangan, pakan dan agens hayati, dalam rangka pengkajian dan pasca pengkajian. Daftar PRG yang telah mendapatkan keputusan pelepasan dan/atau peredaran PRG dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan.3.Aspek terpenting dalam pengawasan PRG di tempat pemasukan yaitu pengawasan terhadap persyaratan dokumen PRG antara lain sertifikat keamanan hayati PRG, certificate of free trade, dan pelabelan sebagai bentuk jaminan penyediaan informasi. 4 Pihak yang akan memasukan PRG ke dalam wilayah

Indonesia wajib :a.menyertakan keputusan pelepasan dan/atau peredaran PRG yang diterbitkan oleh Menteri/Kepala LPNK yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau rekomendasi Komisi Keamanan Hayati (KKH) untuk keperluan pengkajian.b.mencantumkan keterangan PRG pada label.c.Menyertakan dokumen pernyataan yang jelas untuk PRG dalam bentuk curah atau tidak dikemas. 5.Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan PRG, diperlukan jejaring kerja laboratorium dan jejaring informasi antara akademisi, peneliti, swasta dan institusi terkait, termasuk Badan Karantina Pertanian.6. Sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk memberikan informasi yang benar mengenai PRG.

Begitu pentingnya pengawasan terhadap pangan PRG termasuk yang berasal dari pemasukan, diharapkan dapat segera disusun suatu kajian teknis mengenai pengawasan pemasukan PRG ke dalam wilayah Indonesia sebagai bahan penyusunan regulasi. Kajian teknis tersebut meliputi persyaratan pemasukan PRG, tata cara pemasukan PRG, mekanisme penilaian/pemeriksaan di tempat pemasukan, monitoring PRG yang dimasukkan, dan hal-hal lain yang perlu pengaturan. Semoga regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan pengawasan pemasukan PRG ini dapat segera terealisasi sehingga semua PRG yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dan yang diedarkan di Indonesia menjadi lebih jelas, memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dan terjamin keamanannya.

Oleh:

Nina Marlina A, S.TP., MP
(Fungsional PMHP Ahli Madya)

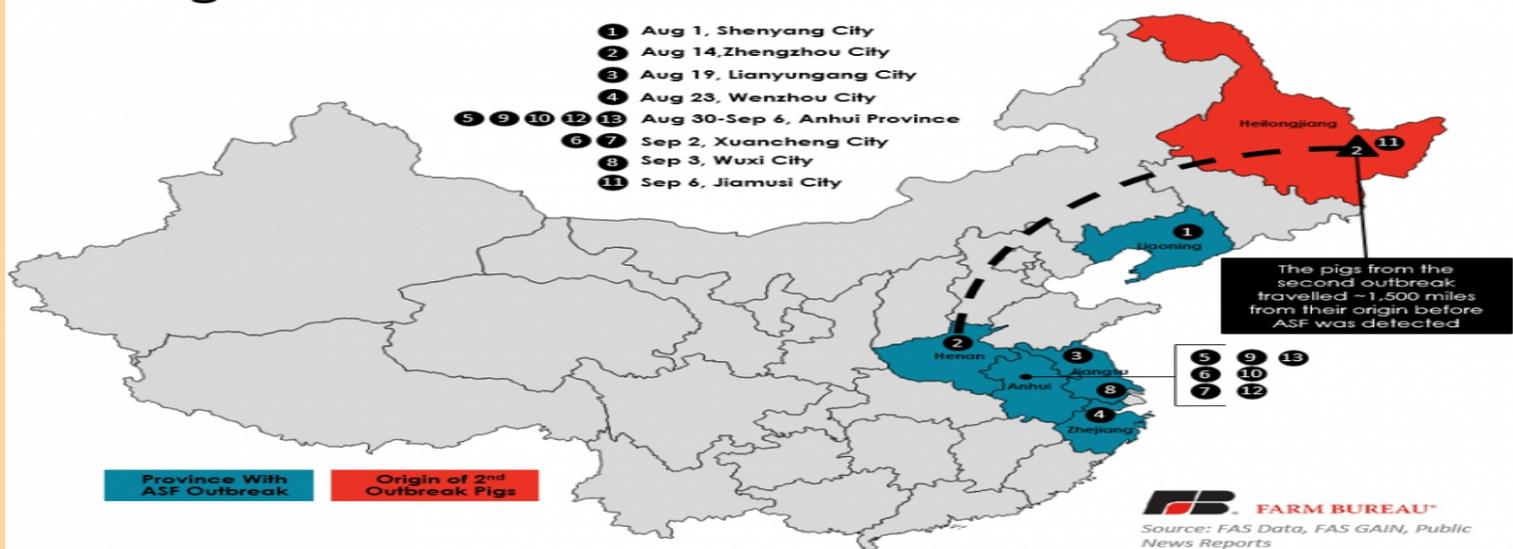


WABAH AFRICAN SWINE FEVER DI CHINA, APA PENGARUHNYA TERHADAP MARKET DAGING BABI ?

Beberapa minggu yang lalu, China melaporkan beberapa kejadian wabah penyakit African Swine Fever (ASF) dan total outbreak sejak awal Agustus 2018 sudah ada 13 kali di 6 provinsi. ASF adalah penyakit hewan yang sangat menular, disebabkan oleh virus yang dapat menyebar dengan cepat pada suatu populasi babi yang padat baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Babi dapat

Minggu berikutnya, China melaporkan bahwa lebih dari 35,5 juta ekor babi diuji terhadap ASF dan sekitar 700 ekor babi yang rentan terhadap ASF telah dimusnahkan. Berikut adalah penyebaran ASF di China. Wabah berikutnya adalah provinsi Henan dengan jarak 900 mil, provinsi Heilongjiang yang jaraknya 1500 mil. Di kedua provinsi tersebut terjadi kematian ternak babi dan sebagian menunjukkan gejala penyakit ASF. Diduga

Figure 1. African Swine Fever Affected Provinces



terpapar virus melalui berbagai cara termasuk melalui caplak dan kontak langsung melalui hewan, juga kontak dengan makanan, pakan ternak atau transportasi yang tertular virus ASF. Virus ASF dapat bertahan lama pada produk babi yang mentah, yang dapat memulai penularan di lingkungan yang baru. Virus sangat bandel dan dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang ekstrim pada daging segar dan beku. Hingga kini belum ada vaksin ataupun pengobatan dan tingkat kematiannya mendekati 100%. ASF dapat dipindahkan melalui manusia tetapi tidak berdampak pada manusia dan dipastikan tidak memiliki implikasinya terhadap kesehatan manusia. ASF sudah menjadi isu tahun ini di Eropa Timur dimana pada Agustus 2018 pertama kalinya negara terbesar penghasil daging babi dunia telah melaporkannya kejadian tersebut.

Kronologis kejadian ASF?

Petugas dari provinsi Liaoning pertama kali mendeteksi kejadian ASF pada 1 Agustus 2018. Tanggal 3 Agustus 2018 berikutnya Petugas Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan melaporkan wabah ini ke OIE.

kejadian penyebaran penyakit adalah akibat lalu-lintas ternak ke wilayah yang kebetulan tidak memiliki fasilitas pemanenan ternak.

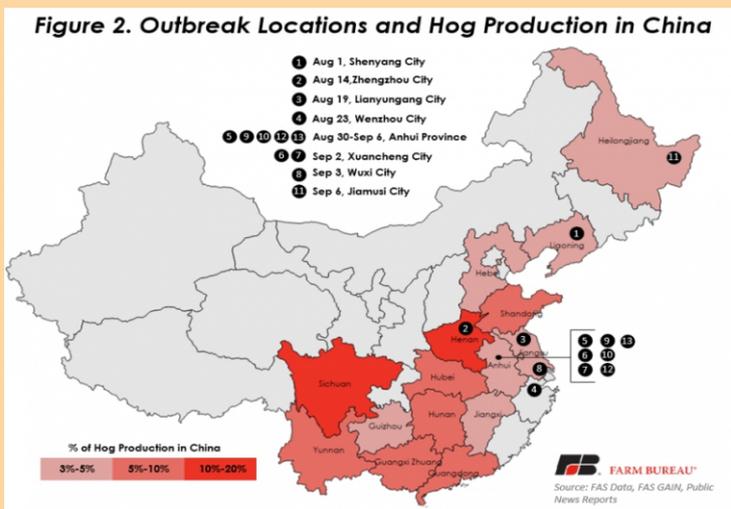
Saat tulisan ini dibuat, sudah ada tiga belas wabah di China (Gambar 1), dengan empat kasus terakhir terjadi dalam satu hari (6 September). Hingga saat ini, beberapa ratus babi telah diidentifikasi dengan virus tersebut. Mengingat penyebaran yang cepat di ribuan mil di negara itu, ada juga ketakutan kalau-kalau virus dapat melompati perbatasan dan menyebar ke luar China. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menyerukan dilakukan pertemuan darurat tiga hari untuk memeriksa wabah dan membahas strategi guna mengekang penyebaran ASF ke negara-negara tetangga. FAO menyatakan bahwa ASF hampir pasti tersebar di Asia. Korea Selatan telah mengidentifikasi contoh pertama dari virus yang keluar dari China via lalu lintas dalam bentuk produk daging babi. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Tanaman USDA telah meningkatkan pemeriksaan di perbatasan untuk menghindari masuknya produk babi dari area yang tertular.

Apa Pengaruhnya bagi China ?

China secara agresif berusaha menghentikan penyebaran

ASF. Pejabat setempat telah menetapkan ini sebagai insiden tanggap darurat tingkat II, yang melibatkan polisi setempat dalam proses penyelidikan. Petugas melakukan memusnahkan kawanan yang rentan tertular virus di daerah yang terkena dampak. Dilaporkan bahwa sekitar 40.000 ekor babi telah dimusnahkan, relative sangat kecil dibandingkan dengan persentase populasi babi secara keseluruhan yang diperkirakan hampir 450 juta.

Pemerintah China juga mengumumkan penutupan pasar babi hidup di provinsi-provinsi yang terkena dampak. China telah memperkenalkan larangan mengangkut babi dan produk babi dari, serta melalui, provinsi yang terkena dampak, yang berpotensi mengganggu rantai pasokan daging babi di negara itu secara signifikan. Larangan ini telah mempengaruhi harga ke tingkat tertentu karena ketidakseimbangan pasokan dan permintaan antar provinsi, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan babi dan babi ke tempat yang membutuhkan. Dampak lebih lanjut adalah potensi keributan para produsen menjual ternaknya ke pengolah agar tidak terjebak kemungkinan pemusnahan ternaknya. Mencegah penyakit agar tidak menyebar ke daerah pesisir, di mana sebagian besar wabah baru-baru ini terjadi, lebih jauh ke wilayah pusat negara, di mana banyak sentra produksi daging babi terkonsentrasi, adalah sangat penting (Gambar 2).



China sebagai Pemain Daging Babi Terbesar Dunia

Cina adalah produsen sekaligus konsumen daging babi terbesar dunia. Oleh karena itu, setiap ada gangguan yang signifikan dalam rantai pasok daging babi akan berdampak pada suplai deman dunia. Gambar 3 menyoroti perbedaan skala yang tajam antara Cina dan produsen daging babi terbesar lainnya. Dilaporkan bahwa China telah memusnahkan sekitar 40.000 ekor hewan. Angka tersebut cukup kecil dan tidak

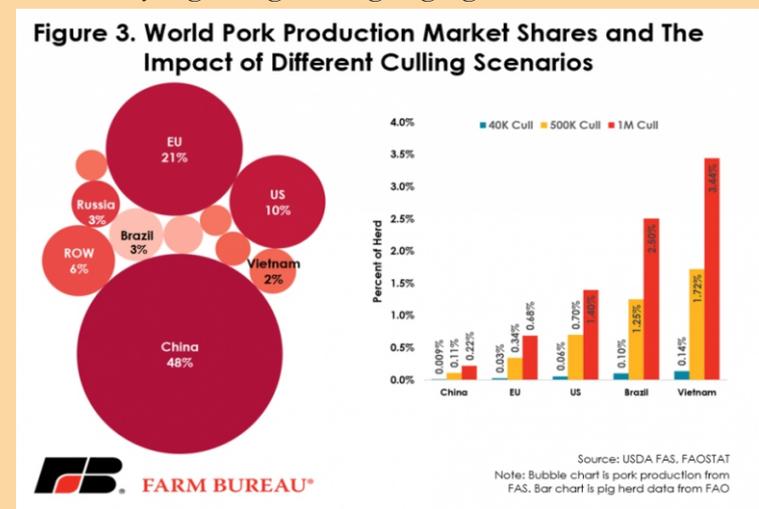
memengaruhi lima negara penghasil daging babi terbesar lainnya, tetapi jumlah yang akan dimusnahkan diperkirakan akan terus bertambah..

Dampak terhadap pasokan daging babi dunia akibat kejadian ASF di China, tergantung dari berbagai variable, antara lain efektifitas pengendalian penyebaran virus, seberapa banyak hewan yang tertular dan tingkat virulensi pada ternak babi yang tertular. Jika virus tersebut sangat virulen sementara pengendalian kurang maksimal, maka kurva produksi daging babi China kedepan akan menurun tajam.

Masih adakah Peluang Ekspor Daging Babi ke Amerika Serikat?

Terjadinya kasus ASF di China pasti tidak akan meningkatkan ekspor daging babi ke AS, dampak keseluruhan belum dapat diprediksi, apalagi ada pemain lainnya untuk daging babi. Selain tariff impor daging babi ke AS sangat tinggi yaitu 70 %, sehingga adanya gangguan akibat ASF sangat berpengaruh. Faktor lainnya adalah China bebas ractopamine, sementara AS memproduksi beberapa “racto-free pork”, dalam jumlah tidak besar. Sehingga China lebih memilih ke negara “racto-free” seperti EU atau Kanada sebelum beralih ke AS atau Brazil.

Dampak bagi Indonesia : virus ASF dapat ditularkan melalui daging babi maupun sisa-sisa daging babi. Untuk itu harus dilakukan pengawasan yang ketat terhadap lalu lintas MP yang mengandung daging babi karena



berpotensi menularkan virus ASF. Sampai saat ini belum ada vaksin maupun pengobatan terhadap ASF, sehingga apabila terjadi outbreak penyakit ASF akan sangat berdampak pada ternak babi di tanah air, karena ternak harus dimusnahkan.

(Sumber : market Intel, 7 September 2018, oleh Michael Nepveux)

Oleh
drh Erlina Suyanti M.AppSc.- Medik Veteriner Muda

PEMERINTAH SELANDIA BARU MELAKSANAKAN PROGRAM ERADIKASI TERHADAP MYCOPLASMA BOVIS

Pada tahun 2018, tepatnya tanggal 28 Mei 2018, pemerintah Selandia Baru telah mengumumkan akan melaksanakan program eradikasi (pemberantasan) terhadap Mycoplasma Bovis selama satu dekade kedepan. Pada tahap awal, Selandia Baru akan melakukan stamping out terhadap ternak sapi maupun sapi perah sebanyak 150 ribu ekor. Selanjutnya stamping out akan terus dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi penyakit tersebut di seluruh wilayah di Selandia Baru dan diperkirakan dalam satu dekade, negara ini akan benar-benar terbebas dari penyakit Mycoplasma bovis.

Penyakit pertama kali diidentifikasi oleh Otoritas Selandia Baru tahun 2017 dan sejauh Ini telah terdeteksi di 37 farm. Terdapat tambahan 260 farm terduga dari 20 ribu yang tersebar. Saat ini di seluruh dunia hanya terdapat strain tunggal dari Mycoplasma bovis yang telah diidentifikasi.

Mycoplasma adalah sekelompok bakteri yang sangat kecil dengan karakteristik yang berbeda, sehingga beda dengan jenis bakteri yang lain. Terdapat lebih dari 125 jenis mycoplasma dan masing-masing spesies hanya menulari satu jenis hewan, pada sapi terdapat 12 jenis spesies namun hanya Micoplasma bovis yang paling berbahaya apabila terjadi penularan. Mycoplasma termasuk M. bovis memiliki karakteristik yang terkait dengan mekanisme pertahanan tubuh yaitu meliputi :Kurangnya dinding sel, sehingga penggunaan antibiotik dengan spektrum luas menjadi tidak efektif, kemampuan bersembunyi dari sistem kekebalan tubuh sehingga sapi sulit

bertarung terhadap infeksi serta kemampuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan penghindaran dari pengobatan antibiotik, misalnya pada abses yang luas.

Dalam peraturan Biosecurity Act 1993 Selandia Baru, Mycoplasma bovis terdaftar sebagai organisme yang tidak diinginkan dengan pertimbangan karakteristik tersebut, sebaliknya bakteri tersebut hampir ada di seluruh dunia. Sebelumnya Selandia Baru, bebas terhadap penyakit ini, namun tepatnya pada tahun 2017 terjadi beberapa kasus penyakit ini di beberapa peternakan di Selandia Baru. Dunia tahu bahwa sektor peternakan merupakan sektor yang sangat penting dan berarti bagi negara ini dan untuk menghentikan penyebaran penyakit ini, maka pemerintah Selandia memutuskan untuk melakukan program eradikasi penyakit terhadap Mycoplasma bovis.

Mycoplasma bovis memang tidak masuk dalam daftar OIE dan bahkan tidak menular ke manusia. Namun dari segi ekonomi penyakit ini sangat merongrong. Pada kondisi kronis, penularan Mycoplasma bovis menyebabkan kehilangan berat badan sehingga dalam jangka panjang sangat merugikan peternak baik untuk sapi perah maupun sapi pedaging. Selain itu menyebabkan mastitis, radang sendi pada sapi dan anak sapi, radang paru-paru pada anak sapi serta keluron (abortus) dalam jangka panjang. Yang parahnya, tidak semua sapi yang tertular akan menunjukkan gejala sakit, banyak penularan penyakit tidak menyebabkan sakit sehingga berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit antar farm apabila sapi berpindah-pindah.

Bagaimana Program Eradikasi *Mycoplasma bovis* di Selandia Baru dilakukan?

Sejak diketahui adanya beberapa farm yang positif terhadap *M. bovis*, maka pemerintah Selandia Baru berupaya untuk memberantas penyakit tersebut dalam 10 tahun kedepan dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 2018. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,7 juta jiwa dan populasi sapi perah 6,5 juta ekor dan sapi potong 3,6 juta ekor, negara ini merupakan eksportir terbesar produk susu yaitu 1/3 perdagangan dunia dengan nilai 12 milyar

Klaim peternak yang ternaknya dipotong paksa berkisar sekitar 4-10 hari dengan klaim penuh selama 2-3 minggu. Biaya kompensasi akibat program eradikasi yang dilaksanakan pemerintah ditanggung bersama antara pemerintah Selandia Baru (sebesar 68%) dan Asosiasi (sapi perah, sapi potong & domba, sebesar 32%).

Opsi lainnya adalah manajemen jangka panjang. Diperkirakan akan menghabiskan 1,2 Milyar USD, 698 juta USD merupakan akibat kehilangan produksi



NZ \$ setahun. Program eradikasi akan menghabiskan biaya yang cukup tinggi yaitu sekitar 700 juta \$ AS selama 10 tahun. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya pengujian lab, biaya kompensasi ternak yang di-stamping out, pembatasan pergerakan ternak. Pembatasan pergerakan ternak merupakan hal sulit yang dilakukan, namun pemerintah Selandia Baru mampu melakukannya. Sumber wabah hingga saat ini belum ditemukan tapi menurut para ahli, hal ini banyak terkait dengan impor legal dari semen pejantan atau impor ilegal dari produk veteriner. Tahap awal pemerintah Selandia Baru akan melakukan stamping out sapi sebanyak 150 ribu ekor. Selanjutnya akan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Program stamping out atau “culling” pada sapi yang dilakukan di daerah tertular di wilayah yang ditentukan Semua farm tertular nantinya akan di depopulasi, setelah depopulasi, farm didesinfeksi dan dibiarkan selama 60 hari untuk di-restocked, dilakukan surveilans aktif secara intensif, termasuk pengujian dan penelusuran untuk mendeteksi kawanan yang tertular. Akan ada beberapa fleksibilitas bagi peternak dalam hal waktu “culling” hingga saat kehilangan produksi, proses perbaikan pengajuan kompensasi.

dari peternak dan 520 juta USD adalah biaya tanggapan (response costs).

Program eradikasi terhadap *Mycoplasma bovis* oleh Selandia Baru akan menurunkan populasi ternak untuk waktu tertentu, namun akan memberikan dampak positif bagi perdagangan ternak dan produk ternak di masa depan. Selanjutnya penyakit ini yang juga menyebabkan keluron dalam jangka panjang, dengan program eradikasi akan meningkatkan angka kelahiran sehingga populasi ternak akan meningkat kembali.

Bagaimana dampaknya bagi Indonesia?

Indonesia hingga saat ini masih memerlukan pasokan daging dan susu dari negara-negara produsen tertentu termasuk Selandia Baru. Adanya program eradikasi terhadap *Mycoplasma Bovis* oleh Pemerintah Selandia Baru akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, sehingga importasi Media Pembawa berupa hewan dan produk hewan tidak diikuti masuknya penyakit hewan terutama *Mycoplasma Bovis*.

oleh : Drh Erlina Suyanti MappSc
Medik Veteriner Muda Badan KarantinaPertanian

***Colletotrichum kahawae*, Masih A1 di Indonesia**

Kopi merupakan salah satu minuman yang digemari di kalangan masyarakat. Citarasa dan aroma yang khas membuat minuman ini digemari. Menurut sumber International Coffee Organization (2018), Indonesia merupakan negara produsen kopi terbesar ke-4 di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Colombia. Biji kopi dihasilkan dari tanaman *Coffea* sp. Seiring dengan nilai ekspor kopi Indonesia ke beberapa negara seperti USA, Jerman, Malaysia, Italia, Jepang, Rusia, Mesir, Inggris, Belgia, Kanada, pemerintah terus berupaya baik melalui dengan meningkatkan produksi kopi dalam negeri. Namun dalam upaya peningkatan produksi kopi lokal,

Berdasarkan laporan hasil pemantauan daerah sebar OPTK yang dilakukan petugas karantina pertanian di Sumatera Utara, terdapat dugaan adanya cendawan ini di pertanaman kopi di daerah Simalungun dan Tapanuli Utara sehingga perlu diverifikasi keberadaannya. Kegiatan verifikasi bertujuan untuk memastikan kembali status keberadaan cendawan tersebut berdasarkan hasil survei lapang, pengamatan gejala dan tanda penyakit, identifikasi laboratorium (morfometri, Polymerase Chain Reaction (PCR), dan sequencing).

Dari hasil pengambilan sampel buah kopi yang diambil pada saat verifikasi, Balai Besar Uji Standar Karantina



terdapat salah satu ancaman yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas hasil panen, antara lain adanya penyakit pada buah kopi yang disebabkan cendawan *Colletotrichum kahawae*.

Kopi merupakan satu-satunya inang *C. kahawae*. *C. kahawae* dapat menyebabkan gejala antraknosa pada buah kopi (berupa lesio berwarna gelap dan mencekung) atau dikenal dengan sebutan Coffee Berry Disease (CBD). Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 51/2015 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), status cendawan ini masuk kedalam OPTK kategori A1 (belum terdapat di Indonesia), begitu juga pada Lampiran Permentan 31/2018 yang merupakan Permentan perubahan dari



Pertanian (BBUSKP) ditunjuk untuk melaksanakan pengujian dan identifikasi. Pengujian dan identifikasi terhadap OPT pada sampel dilakukan dengan metode blotter test, PCR dan sequencing. Hasil pengujian dan identifikasi menyatakan bahwa OPT yang terdapat pada sampel buah kopi bergejala tersebut bukan *C. kahawae* (hasil uji negatif), sehingga status cendawan tersebut untuk saat ini masih sebagai OPTK A1. (UK)

Oleh:
Kemas Usman, SP., M.Si.
POPT Muda Badan Karantina Pertanian

FOLLOW UP ISU PERLINDUNGAN TANAMAN DALAM RAKOR NPPO

Pertemuan bertajuk Rapat Koordinasi (Rakor) digelar oleh anggota National Plant Protection Organization (NPPO) selama 3 (tiga) hari, 16-18 Juli 2018 di Hotel Grad Diara, Cisarua, Bogor. Selaku Focal Point NPPO Indonesia, Badan Karantina Pertanian (dalam hal ini Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati/KTKHN) menjadi fasilitator Rakor. Rakor dipimpin oleh Kepala Pusat KTKHN (Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc.) dan turut dihadiri oleh Direktur Perlindungan Hortikultura serta anggota NPPO lainnya yang merupakan perwakilan dari Badan Karantina Pertanian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman

bawang Bombay (onion) Ukraina, penyusunan pest list PRA ASEAN, akses pasar buah ke Taiwan, kebijakan keamanan pangan (food safety) Indonesia, akses pasar buah naga ke China, akses pasar jahe ke Vietnam, dan update hasil pertemuan Commission on Phytosanitary Measures (CPM) tahun 2017 dan persiapan pertemuan Standards Committee (SC) di Korea Selatan

Selain itu, Rakor juga membahas tentang perlunya sinergitas antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait prosedur pemasukan benih tanaman kehutanan yang selama ini belum optimal.



Pangan, Ditjen Hortikultura, dan Ditjen Perkebunan. Dalam Rakor ini, dilakukan pembahasan isu-isu krusial perlindungan tanaman terkait perdagangan internasional yang menjadi concern Indonesia dengan negara mitra dagang dan perlu mendapat tindak lanjut (follow up). Isu yang dibahas dalam Rakor tersebut, antara lain: update pengembangan bawang putih di Indonesia, verifikasi dugaan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPT/OPTK), pelarangan impor *Bucephalandra* sp. oleh Korea Selatan, pengendalian lalat buah di kebun salak Yogyakarta, hasil verifikasi lapang *Radopholus similis* pada *Polycias* sp., kajian Pest Free Area (PFA)

Peserta Rakor bersepakat untuk meningkatkan koordinasi antar anggot NPPO serta dengan instansi terkait lainnya dalam upaya optimalitas perlindungan tanaman di Indonesia. Upaya peningkatan juga dilakukan dengan memperbaharui Surat Keputusan (SK) mengenai susunan keanggotaan NPPO di Indonesia beserta tugas pokok dan fungsinya. (UK)

Oleh:
Kemas Usman, SP., M.Si.
POPT Muda Badan Karantina Pertanian

PROGRAM SURVAILEN TERHADAP JOHN DISEASE DI WILAYAH SASKATCHEWAN, KANADA

Program Surveilans John's disease (JD) di Saskatchewan Kanada telah berhasil dilakukan dan diikuti secara sukarela oleh para produsen sapi setempat. Animo mereka cukup baik dan bahkan meningkat setiap tahun bahkan hingga ada daftar tunggu dalam dua tahun terakhir.

Disamping antusiasme, ada juga peserta yang ketakutan karena khawatir ternaknya kemudian ditemukan positif terhadap JD. Dari bulan November 2013 sampai Maret 2017 misalnya, terdapat sekitar 400 ekor (sekitar 3 %) ternak yang positif di antara 12.300 hewan yang diuji dari 67 kelompok ternak. Lima puluh dari 67 kelompok ternak paling tidak terdapat 1 (satu) ekor yang positif. Tingkat penularan tertinggi dalam satu kawanan adalah 25 %.



Dr. Wendy Wilkins, dokter hewan yang bertugas sebagai pengawas penyakit di Kementerian Pertanian Kanada, mengatakan bahwa angka-angka tersebut tidak mewakili keseluruhan prevalensi JD di Saskatchewan karena sebagian besar peserta menerapkan program tersebut hanya untuk mengetahui atau menduga bahwa JD sebenarnya sudah ada dalam kelompok ternak mereka. Sembilan produsen tidak tahu atau menduga bahwa JD sudah ada dan memutuskan untuk memastikan kawanan ternak yang diuji dan 2 (dua) orang ternyata keliru. Situasi yang lebih terwakili di provinsi ini adalah Kanada Barat. Jaringan Surveilans Sapi di bagian Barat Kanada menemukan 1 (satu) ekor sapi positif dalam 23 % kawanan yang diperiksa. Secara keseluruhan, 1,5 % sapi itu positif.

Produsen telah mengajukan permohonan untuk menguji sampai 250 ekor setiap dua tahun dalam program Saskatchewan. Salah satu produsen yang telah berpartisipasi selama 3 (tiga) kali menemukan 18 positif pada 2013, 4 (empat) di tahun 2014, dan 9 (sembilan) di tahun 2016. Yang lain menemukan 1 (satu) pada tahun 2013, 0 (nol) pada tahun 2014, dan 3 (tiga) di tahun 2016. Hewan yang tertular JD / Paratuberkulosis (Foto file Dr Karin Orsel)

Hal Ini menunjukkan bahwa eliminasi atau pemberantasan penyakit JD dari kawanan ternak merupakan komitmen jangka panjang dan makan waktu. Strategi yang disarankan adalah melakukan uji/tes dan selanjutnya memusnahkan individu yang positif (stamping out) demikian juga berlaku untuk sapi anak (calves).

Karena dana yang terbatas maka siapa yang daftar lebih awal itulah yang akan dilayani. Pembiayaan mencakup biaya laboratorium, dan biaya jasa dokter hewan (1 dokter) untuk koleksi darah, dan \$ 500 untuk biaya konsultasi lainnya dengan dokter hewan untuk analisa risiko dan perencanaan manajemen. Program ini akan berakhir pada bulan Maret 2018, namun, Kementerian Pertanian Kanada mendukung dan akan melanjutkan layanan ini dan akan segera mengajukan proposal untuk pendanaan ke Kerjasama Pertanian Kanada yang baru atau berikutnya.

Kesimpulan: Pemerintah Kanada berupaya untuk membebaskan penyakit hewan JD yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium avium* sub-spesies paratuberculosis di wilayahnya melalui program surveilan bagi peternak. Program ini dilakukan secara berkesinambungan dan pemerintah mengeluarkan biaya untuk uji lab, jasa konsultasi dokter hewan dan stamping out. Tidak ada informasi apakah pemerintah memberi kompensasi bagi ternak petani yang di stamping out.

oleh :

Drh Erlina Suyanti MappSc
Medik Veteriner Muda Badan
KarantinaPertanian

TIM REDAKSI

Pelindung:

Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat:

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Pelindung :

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:
Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : drh. Tatit Diyah NR, M.Si

Editor : Kartini Rahayu, SIP.

Redaktur Pelaksana : Kemas Usman, SP., M.Si.

Sekretariat : Heppi S Tarigan, SP
Helmi Fajar S, SH

Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk SPS Newsletter

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan
Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,
Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367
Email: sps.indonesia@pertanian.go.id